

DPRD DKI Pantau Penggunaan Anggaran Dishub

Jakarta, HanTer - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini menggelar rapat kerja (raker) untuk memonitoring penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di jajaran Dinas Perhubungan (Dishub).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan, rapat ini digelar untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di Dishub sepanjang 2018.
"Monitoring ini dilakukan agar kita tahu sejak awal persoalan yang dialami SKPD," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).
Menurut Suhaimi, dari rapat ini diketahui kendala penyerapan anggaran yang dialami Dishub. Di antaranya seperti masalah gagal lelang karena perusahaan penyedia barang atau jasa tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

agar program yang diharapkan bisa berjalan," jelasnya.
Suhaimi mengaku akan mengawal penyerapan anggaran, baik yang sedang dan akan dilaksanakan Dishub DKI Jakarta. Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberikan sejumlah rekomendasi.
"Karena kita ingin penyerapan SKPD sebagai mitra kerja Komisi B tinggi sampai akhir tahun anggaran," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah memaparkan penyerapan anggaran di jajarannya sampai bulan keempat triwulan pertama 2018 ini telah mencapai 16,14 persen atau Rp121,49 miliar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp752,801 miliar di APBD 2018.
"Kami optimistis akan optimal penyerapan anggaran hingga akhir tahun," tandasnya.

■ Sammy

PPP Tantang Cak Imin Adu Kualitas Intelektual



ARSUL SANI

Jakarta, HanTer - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersaing secara sehat dengan cara-cara yang memberikan pencerahan kepada rakyat.
"Caranya ya mari beradu konsep dan pemikiran dalam debat publik di hadapan panel ahli, biar kelihatan kualitas intelektual masing-masing," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani di Jakarta, Rabu.
Menurut Arsul, akan lebih menarik dan mencerahkan apabila ada debat publik antara Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait isu-isu nasional seperti ekonomi dan pembangunan, ilmu dan teknologi, masalah sosial

politik dan kebangsaan di hadapan panel ahli.
"Biar kontestasi partai atau jabatan publik tidak berbasis hal-hal yang sifatnya nyinyir," kata Arsul.
Sebenarnya, lanjut Arsul, pernah ada kesempatan pada Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, dan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, untuk berada dalam satu forum diskusi, yakni di acara Q & A (Question & Answer) Metro TV beberapa waktu lalu.
Menurut Arsul, format acara itu adalah beradu pandangan dan konsep berdasarkan pertanyaan dari 12 panelis, di antaranya pakar hukum Asep Iriawan, pengamat politik J Kristiadi, budayawan Sujiwo Tejo, dan peneliti LIPI Siti Zuhro.

■ Danial

SANDIAGA MINTA FDG DORONG PENERIMAAN ZIS DKI RP300 M

Focus Group Discussion (FGD) diharapkan mampu mendorong Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Jakarta mencapai Rp300 Miliar pada tahun ini.

Jakarta, HanTer - Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno usai membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Kepastian Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Provinsi DKI Jakarta' di Ruang Serbaguna Lantai 22 Blok G, Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Kegiatan diharapkan dapat menciptakan sinergi antar lembaga pengelola ZIS Jakarta dan mencapai target penerimaan Rp 300 miliar pada tahun 2018.
"Kita FGD di sini. Kita kumpulkan, kita curahkan potensinya apa. Nanti road map-nya seperti apa. Bagaimana collection growth itu harus selalu di atas 20 persen. Sekarang ini baru 15-20 persen. Jadi, collection growth ini harus meningkat. (Target) Rp 300 Miliar ini karena saya dorong," ujar Sandiaga.
Meski pengumpulan ZIS di wilayah Jakarta dinilai masih belum optimal, namun ia juga mengapresiasi bagaimana Bazis DKI Jakarta telah memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk pembangunan dan



ILUSTRASI

menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Saya harapkan dari FGD ini akan lahir analisa, rekomendasi, solusi, peta jalan, target, sasaran kongkrit dan juga menggunakan teknologi dan digital. Kita gunakan juga kebangkitan dari ekonomi syariah. Kita juga gunakan kebangkitan semangat masyarakat Jakarta untuk melaksanakan syariat agamanya," ujar Sandiaga.
Sandiaga menuturkan hasil FGD ini akan menjadi rekomendasi penting untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Agama dan Baznas. Ia meyakini FGD ini dapat menaik-

kan potensi ZIS menjelang bulan Ramadhan. Nantinya, penerima manfaat pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta, diberikan kepada perorangan dan juga kepada institusi, organisasi dan perkumpulan seperti Majelis Taklim, Masjid dan Mushalla.
Dalam FGD ini, beberapa narasumber yang hadir antara lain M Taufik (Wakil Ketua DPRD Jakarta), Tri Wicaksana (Wakil Ketua DPRD Jakarta), Amin Summa (Akademi UIN Jakarta), Yusuf Wibisono (Direktur IDEAS, Akademisi UI), Ridwan Saidi (Budayawan Betawi), Bambang Suherman (Ketua Umum Forum

”

Kita FGD di sini. Kita kumpulkan, kita curahkan potensinya apa. Nanti road map-nya seperti apa. Bagaimana collection growth itu harus selalu di atas 20 persen. Sekarang ini baru 15-20 persen. Jadi, collection growth ini harus meningkat. (Target) Rp 300 Miliar ini karena saya dorong

Sandiaga Uno
Zakat Nasional), Nur Efendi (CEO Rumah Zakat), Syamsul Huda (CEO Lazisnu / NU Care) dan Hitman Latief (CEO Lazisnu).
■ Sammy

KASUS KORUPSI SKL BLBI Yusril Minta Sri Mulyani Bertanggungjawab

Jakarta, HanTer - Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) dari jerat pidana.
"Kenapa Pak Syafruddin ini yang diadili? Kan PPA dan Menkeu tahun 2007 itu yang harusnya diadili," ujar Yusril, kuasa hukum Syafruddin Tumen-

ggung di Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Menurutnya kerugian negara terkait SKL BLBI disebabkan keputusan Menteri Keuangan tahun 2007 yang saat itu dijabat Sri Mulyani dengan menjual hak tagih dengan harga yang sangat rendah.
"Tahun 2007 hak tagih itu dijual oleh Menkeu dan

PT PPA. Dijual PT PPA, tentu dengan persetujuan Menkeu ya kan. Dijual dengan harga 220 miliar. Jadi terjadi kerugian negara 4,8 Triliun dikurangi 220 Miliar," lanjutnya.
Menurutnya kliennya tidak bersalah dalam kasus mega korupsi itu, melainkan Sri Mulyani dan pihak PT Perusahaan Pengelolaan

Aset (PAA) yang seharusnya diminta pertanggungjawaban secara hukum. Alasannya Syafruddin telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kepala Badan Perbankan Penyelesaian Nasional (BPPN).
Syafruddin menjalankan tugas sesuai dengan keputusan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan

(KKS) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu.
Sebaliknya, Sjamsul Nursalim selaku stakeholder Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) juga sudah melakukan segala kewajibannya untuk melunasi sangkutan.
■ Safari

MITRA INTERNATIONAL RESOURCES
RAPAT UMUM PEMANGGILAN
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk ("Perseroan")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
Waktu : 15.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan
Dengan Agenda sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
CATATAN:
1) Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di PT KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 pada pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah Pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 pada pukul 16.00 WIB.
2) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh sebagai pemegang kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, nomor telepon: (021) 29745222, nomor fax: (021) 29289981;
4) Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat.
6) Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya telah ditetapkan Direksi Perseroan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahan-perubahannya telah ditetapkan Direksi Perseroan.
7) Demi keterbukaan rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang Sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 19 April 2018
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan

PT. BPR ARTHARINDO
LAPORAN KEUANGAN (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)
LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR ARTHARINDO Tanggal : 31 Desember 2017
LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR ARTHARINDO Tanggal : 31 Desember 2017
LAPORAN INFORMASI LAJIN PT BPR ARTHARINDO Tanggal : 31 Desember 2017
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR ARTHARINDO Tanggal : 31 Desember 2017
KETERANGAN: L, KL, D, M, Jumlah
1. Penempatan pada bank lain 110.554.509 0 0 0 0 110.554.509
2. Kredit yang diberikan a. Kepada BPR 0 0 0 0 0 b. Kepada Bank Umum 0 0 0 0 0 c. Kepada non bank - pihak terkait 966.684 0 0 0 0 966.684 d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 221.054.045 4.083.401 1.648.248 2.587.067 229.372.761 3. Jumlah aset produktif 332.575.238 4.083.401 1.648.248 2.587.067 340.893.954
4. Rasio-Rasio (%) a. NPL net 3,12 b. KPMI 16,41 c. LDR 71,30 d. ROA 4,76 e. KAP 1,75 f. PPAAP 102,08 g. BOPO 70,52 h. Cash Ratio 11,09
PENGURUS BANK: 1. Grace Agustina (50%), 2. Hardy Yumnaraga (20%), 3. Lindawati (20%), 4. Sigit Pratama Wiryadi (10%)
PEMILIK BANK: 1. Grace Agustina (50%), 2. Hardy Yumnaraga (20%), 3. Lindawati (20%), 4. Sigit Pratama Wiryadi (10%)
Pemegang Saham Pengendali: 1. Grace Agustina
Ultimate Shareholder
Laporan Publikasi ini sudah diaudit Kantor Akuntan Publik Nama Kantor Akuntan Publik: Hutan Publik yang Menerbitkan Laporan: NIP Kumalahti, Kencana, Sigeng Purnadi & Rakan
Catatan: BPR dengan total aset Rp10 miliar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (gaffar-in-charge). Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PB/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Persewaan Ritel dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/20/ED/BI tanggal 31 Juli 2015 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
Jakarta, 19 April 2018
Direksi, BPR Artharindo
1. Bonifatius Budi Sundjaja
2. Ziza Andreswati